

LAMPIRAN 6

Yogyakarta, 5 Maret 1975.

KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : K.896/I/A/1975

Lampiran :

Perihal : Penyeragaman Policy
Pemberian Hak Atas
tanah kepada seorang
WNI non Pribumi.

Kepada :

Yth. Bupati/Walikota Kepala Daerah
Seluruh Daerah Istimewa
Yogyakarta

INSTRUKSI

Sebagaimana diketahui policy Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang belum meremehkan hak milik atas tanah kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi yang mengelukar tanah.

Guna penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi, dengan ini diminta: Apabila ada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, salah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan sesuatu hak.

Kemudian halaknya menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Cap ttd.

PAKU ALAM VIII

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD DIY
2. Ketua DPPC Kadja Yogyakarta
3. Kepala Dlt Agraria DIY
4. Kepala Suu Dlt Pemerintah Pem. D Kadja Yk.
5. Kepala Kantor Perundangan-undangan Giri Tata Hukum DIY
6. Kepala Kantor Urusan Kadja Yogyakarta.